

**Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional
di Desa Tunggulsari Kabupaten Rembang**
*Fishermen Human Quality
in Tunggulsari Village Rembang Regency*

Andayani Listyawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial R.I
Jln Kesejahteraan Sosial No 1, Nitipuran, Yogyakarta. E-mail: <andayani307@yahoo.com>
Diterima 27 September 2013, direvisi 15 Januari, disetujui 17 Februari 2014.

Abstract

Traditional fishermen are part of a society with low level of welfare. Generally, traditional fishermen exploit sea treasury with simple instruments, low capital and depending on season. The fishes they get are still oriented for daily consumption (subsistence), rather than to sell or reinvest for a bigger fishery business. The research on traditional fishermen in Tanjungsari Village is meant to describe human resources enhancement to access education and skill on oceanic and fishery resources. The approach used in this research is qualitative descriptive, data gathering are implemented through interview and documentary analysis technique, and data analysed through qualitative-descriptive technique. The result shows that human resources of traditional fishermen relatively are low. The indication can be seen from their education and skill related to fishery, that have an impact on the ability to solve their poverty and enhance their welfare. To increase their lives level, it is recommended that traditional fishermen should be given access to education, especially their skill to manage sea and fishery resources based on social value and culture of traditional fishermen community.

Keywords:

Human Resources Quality-Traditional Fishermen

Abstrak

Nelayan tradisional merupakan bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Pada umumnya nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya kelautan dengan peralatan tangkap sederhana, modal usaha kecil, dan sangat dipengaruhi musim. Hasil tangkapan ikan masih berorientasi pada pemenuhan konsumsi sehari-hari (*subsistence*) daripada dijual dan diinvestasikan untuk pengembangan usaha. Penelitian Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional di Desa Tunggulsari, Kabupaten Rembang merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan berbagai upaya peningkatan sumber daya nelayan tradisional melalui kesempatan mengakses pendidikan dan keterampilan mengelola sumber hayati kelautan dan perikanan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sumber daya nelayan tradisional relatif rendah. Indikasi ini tampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang terkait dengan kenelayanan, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Dalam rangka memperbaiki taraf hidup, direkomendasikan program pemberdayaan berupa peningkatan kualitas sumber daya nelayan tradisional melalui upaya kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih layak, khususnya keterampilan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan yang bertumpu pada keberadaan pranata sosial budaya masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.

Kata Kunci:

Kualitas Sumber Daya–Nelayan Tradisional

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah laut sangat luas. Di dalam laut tersebut terkandung keanekaragaman potensi sumber daya kelautan sangat besar potensi terutama di bidang perikanan yang sangat melimpah. Secara teoritis, dengan kekayaan laut yang demikian besar nelayan mampu hidup

berkecukupan. Namun realitas menunjukkan, bahwa tidak semua nelayan dapat menikmati, hanya sekelompok kecil nelayan yang hidup berkecukupan. Selebihnya, sebagian besar menghadapi kesulitan memperoleh hasil laut secara optimal sehingga tetap hidup dalam kondisi miskin. Kelompok dimaksud adalah nelayan tradisional.

Sungguh ironis, dengan sumber daya hayati laut yang luar biasa, nasib nelayan masih mengalami kesulitan hidup. Dilihat secara normatif, nelayan seharusnya hidup sejahtera terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kenyataannya, sebagian besar masyarakat nelayan terutama yang berada di daerah pesisir tersebut masih merupakan kelompok masyarakat tertinggal dibandingkan dengan komunitas lain, hal ini dapat diasumsikan sebagai sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengelola sumber daya hayati kelautan dan perikanan. Padahal untuk menyongsong masa depan kelestarian pengelolaan potensi kelautan membutuhkan kearifan dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan memanfaatkannya. Berkait dengan kemiskinan nelayan tersebut, secara konseptual disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, di antara rendahnya jam kerja efektif sebagai akibat dari keterbatasan SDM, khususnya pengetahuan dan keterampilan ekonomi produktif. Faktor lain adalah berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan modal, dan jaringan perdagangan ikan yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan tradisional.

Beberapa kajian yang mengungkap tentang kemiskinan menyebutkan, bahwa di antara kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat paling miskin (*the poorest of the poor*) dan kelompok sosial terbesar dalam populasi masyarakat nelayan di Indonesia. Hal ini memperlihatkan, bahwa sebagian besar masyarakat nelayan di Indonesia merupakan nelayan miskin, kondisi ini hampir dapat dijumpai di setiap daerah pesisir pantai, seperti nelayan pantai utara Jawa yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah. Kemiskinan di kampung nelayan khususnya pada nelayan tradisional dan buruh nelayan menjadi fenomena umum yang banyak terjadi (Arif Satria, 2008). Hal ini diperkuat dari data (BPS, 2008) bahwa sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan perdesaan.

Berkait dengan permasalahan tersebut, pada dasarnya konsep pengentasan kemiskinan nelayan tradisional tetap menarik untuk dikaji. Berbagai upaya untuk mengentaskan

kemiskinan pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan yang pada dasarnya memberi penekanan pada partisipasi seluruh masyarakat. Hal ini memberi arti bahwa setiap program atau kegiatan pengentasan kemiskinan harus melibatkan seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Program harus bersifat partisipatif, dalam arti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat miskin untuk membantu dirinya sendiri keluar dari keadaan miskin yang dialami.

Kondisi kemiskinan yang mengakibatkan kehidupan nelayan tidak sejahtera kehidupannya seyogyanya segera ditanggulangi. Beberapa pendapat mengasumsikan, bahwa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan mengelola dan meningkatkan sumber daya nelayan, melalui pendidikan. Pendidikan bagi nelayan seyogyanya diterapkan karena pada hakekatnya merupakan *human investmen* dan *social capital*, yang akan berdampak pada kecerdasan dan kesejahteraan nelayan. Pendidikan yang memadai menjadi modal untuk menciptakan berbagai peluang kerja, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan. Pendidikan yang rendah diprediksi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Berdasarkan pendataan dari berbagai sumber diketahui, bahwa sumber daya manusia nelayan paling tinggi sebatas tamat Sekolah Dasar (19,6 persen), dan tidak tamat Sekolah Dasar (79,5persen) akibatnya kemampuan untuk mengelola berbagai sumber daya alam laut dan pesisir sangat terbatas. Berkait dengan konteks tersebut, seyogyanya dilaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia nelayan seperti pendidikan dan keterampilan melalui program sekolah lapangan, dengan harapan nelayan akan lebih terbuka luas wawasan dan ilmu pengetahuannya dalam teknologi penangkapan ikan untuk mendukung pekerjaan sebagai nelayan. Mengingat sedemikian pentingnya pendidikan bagi nelayan tradisional, seyogyanya ada kajian yang membahas aspek pendidikan bagi nelayan, supaya nelayan mempunyai kemandirian, kompetensi, dan kapasitas memadai

dalam mengeksploitasi sumber hayati laut untuk mengatasi kesulitan hidup. Berdasarkan hal tersebut kajian ini dilaksanakan.

Merujuk pada kondisi di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan kualitas sumber daya nelayan tradisional. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya meningkatkan sumber daya nelayan tradisional. Manfaat hasil kajian ini, pertama sebagai salah satu masukan bagi Kementerian Sosial RI dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya dan kesejahteraan sosial keluarga nelayan tradisional di pesisir. Kedua, menambah referensi tentang cara meningkatkan sumber daya manusia nelayan tradisional.

B. Kajian Teori

Kehidupan nelayan tradisional identik dengan kemiskinan, kekurangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tradisional atau buruh nelayan memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi, apabila ada kebutuhan mendadak yang cenderung membuat mereka menjadi *collapse*. Penyebabnya sangat kompleks, antara lain faktor alam dan musim yang kadang sulit ditebak (fluktuatif), ketinggalan teknologi, kekurangan modal, dan tingkat pendidikan.

Pada dasarnya kemiskinan nelayan dilatarbelakangi oleh dua faktor, pertama faktor internal berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja (pemilik perahu nelayan dengan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan dan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, gaya hidup yang dipandang *boros* sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Kedua, faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, meliputi: kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan partial, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek

penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir, serta penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan (Kusnadi, 2008:19).

Realitas menunjukkan, bahwa nelayan merupakan kelompok sosial yang paling terpuruk kesejahteraan hidupnya dan merupakan bukti paling konkrit tentang kemiskinan di desa pesisir. Boedisantoso mengemukakan, bahwa sebagian besar nelayan tradisional belum mampu mencukupi kebutuhan pokok minimum secara layak baik kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik, maupun kebutuhan pendidikan (Tateki YT, 2011:8). Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan barang. Nilai kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan, penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (Ahmad Avenroza dkk, 2007: 9). Pada aspek ekonomi tampak pada pendapatan nelayan umumnya masih rendah, aspek sosial tampak bahwa nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan karena secara fisik mereka tidak lagi dapat dikatakan terisolir atau terasing. Keterbatasan politik lebih berwujud dalam bentuk ketidakmampuan dalam mengambil bagian pada kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka mengembangkan organisasi keluar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal. Keterbatasan dalam pendidikan berwujud pada relatif rendahnya sumber daya manusianya. Kenyataan ini mengakibatkan masyarakat nelayan mengalami nasib terpinggirkan (*marginalized*) dari proses kemajuan.

Terjadinya kemiskinan nelayan diklasifikasikan sebagai kemiskinan struktural dan absolut. Kemiskinan struktural disebabkan oleh struktur sosial yang ada pada mereka, sehingga tidak dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan ini digambarkan sebagai: rendahnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, lemahnya akses pelayanan dalam memperoleh permodalan sesuai kebutuhan, tidak mempunyai kekuatan dalam menentukan harga, terbatasnya penguasaan alat produksi, terbatasnya wilayah penangkapan karena alat

produksi terbatas. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (Ahmad Avenroza dkk, 2007:6).

Membahas lebih jauh tentang kemiskinan nelayan terlihat, bahwa sebagian masyarakat nelayan tradisional berada dalam kungkungan kemiskinan yang disebabkan oleh tidak adanya modal dan ketiadaan akses ke berbagai lembaga keuangan. Fenomena tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang, dan dampak lebih lanjut yang dirasakan nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan dan sulitnya memperoleh modal usaha. Terkait dengan kondisi tersebut Kementerian Sosial telah menggariskan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan, bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Berbagai tekanan sosial ekonomi yang dialami nelayan tradisional menjadikan mereka semakin terpuruk. Keterpurukan mereka selain dipengaruhi oleh sejumlah kelemahan internal seperti keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan kurangnya kesempatan mengakses teknologi perikanan, juga ada sejumlah faktor eksternal seperti posisi tawar nelayan yang lemah di hadapan tengkulak, dan jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan tradisional. Untuk memutus mata rantai kelemahan tersebut diperlukan program pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) secara memadai. Realita ini menunjukkan, bahwa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan tradisional agar mampu memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan (www.bunghatta.ac.id.)

Indonesia memiliki sumber alam laut sangat besar, tetapi potensi tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara

signifikan, nasib nelayan seakan diam di tempat. Pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi pada kehidupan sebagian besar nelayan adalah ketidakberdayaan dan ketertinggalan dibanding dengan komunitas lain. Salah satu penyebab ketertinggalan mereka adalah tingkat pendidikan masih rendah. Dalam kondisi keterbatasan pendidikan dan keterampilan, memper-sulit mereka dalam mendayagunakan sumber daya wilayah pesisir dan laut secara maksimal. Adapun permasalahan selain rendahnya tingkat pendidikan, meliputi miskin pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pekerjaannya, kurang tersedia wadah pekerjaan informal, kurangnya daya kreativitas, dan belum adanya perlindungan terhadap nelayan dari jeratan para tengkulak (Muhammad Badiran, 2009: 2).

Salah satu hak bagi manusia adalah memperoleh pendidikan, demikian juga seorang nelayan, berhak memperoleh pendidikan karena pendidikan pada hakekatnya sebagai *human investmen* dan *social capital* untuk kepentingan pembangunan daerah dan nasional. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau baik melalui jalur pendidikan sekolah (formal) maupun luar sekolah (non-formal) berdampak pada kualitas kecerdasan, kecakapan (*skill*), dan kesejahteraan nelayan. Hal ini dimungkinkan mengingat terjadinya kemiskinan pada nelayan tradisional bukan semata-mata berkait masalah ekonomi, tetapi juga sebagai akibat dari pendidikan yang rendah. Seperti yang dikutip dari Makalah: Sejarah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FKIP Unpad menyebutkan bahwa bahwa kualitas Sumber daya manusia disektor perikanan dan kelautan dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas tidak tamat Sekolah Dasar (79,5 persen), tamat Sekolah Dasar (19,6 persen), SMP (1,9 persen), dan SMA (1,4 persen). Melalui pendidikan akan mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya yang terkait dengan sumber daya kelautan dan pesisir. Usaha kearah ini harus bernuansa pada peningkatan kemakmuran nelayan, terutama nelayan kecil dan petani ikan. Salah satu upaya seyogyanya diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dibidang perikanan dan kelautan baik melalui pendidikan formal dan non formal, seperti mengembangkan pendidikan tinggi perikanan yang setara dengan bangsa

lain, mengembangkan pendidikan kejuruan perikanan sesuai dengan kebutuhan pengembangan perikanan, mengembangkan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan profesionalisme SDM perikanan, dan mengembangkan dan memberdayakan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta perikanan industri (Makalah: Sejarah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, FKIP Unpad, 2014).

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian deskriptif ini menguraikan tentang kondisi riil masyarakat nelayan tradisional di daerah pesisir, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lokasi penelitian di daerah pantai utara (Pantura) Jawa, khususnya di daerah berpenduduk mayoritas nelayan tradisional, yaitu di desa Tunggulsari, Kecamatan Kaliorejo, kabupaten Rembang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Sumber data adalah 30 orang responden yang memberikan informasi secara langsung berkaitan dengan topik permasalahan, yaitu nelayan tradisional. Sumber data pendukung adalah aparat desa, tokoh masyarakat, dan data dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif yang menekankan pada persoalan kehidupan nelayan di lokasi penelitian dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya nelayan tradisional agar mempunyai pengetahuan atau pendidikan lebih meningkat, dalam mengelola potensi dan sumber daya setempat secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

D. Hasil Penelitian: Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional

Pada dasarnya wujud perilaku manusia merupakan hasil dari warisan sosial dan budaya. Pola perilaku memperlihatkan suatu tingkat keteraturan yang tinggi, karena orang akan cenderung meniru perilaku orang lain dan akan mengulang pola-pola perilakunya sendiri terus menerus. Pada satu sisi ada kecenderungan untuk menolak perubahan, baik karena kebiasaan yang menguntungkan maupun untuk mempertahankan kebiasaan yang sudah mapan. Di sisi lain, ada kecenderungan untuk menerima

perubahan karena berbagai kebiasaan lama yang dianggap tidak lagi menguntungkan. Kondisi ini menyiratkan bahwa kemampuan nelayan sangat terbatas dalam mengelola sumber daya alam pesisir. Atas dasar ini, maka seyogyanya mata rantai pendidikan yang rendah di kalangan nelayan tradisional tidak diwariskan dan dilanggengkan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, diperlukan regenerasi nelayan yang memiliki kemandirian, kompetensi dan kapasitas yang memadai.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi di atas, diperlukan adanya institusi yang berkompeten menyelenggarakan program peningkatan SDM nelayan, di antaranya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi nelayan atau anak nelayan. Salah satu institusi pemerintah yang mempunyai perhatian serius dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), KKP menerapkan program pendidikan khusus nelayan, yaitu tingkat SLTA perikanan, Akademi Perikanan, hingga Sekolah Tinggi Perikanan dalam bentuk *closed loop and teaching factory*, maksudnya segmen pendidikan khusus ditujukan kepada anak nelayan dengan komposisi peruntukan 40 persen khusus anak nelayan pembudidaya, 40 persen untuk masyarakat umum, dan 20 persen mitra. Pendidikan yang disediakan berupa Sekolah Menengah Usaha Perikanan (SMUP) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yang bebas biaya dan disediakan asrama serta sekolah (tempat pendidikan) dengan pola bekerja sekaligus belajar (www.bunghatta.ac.id:nelayan cerdas-nelayan mandiri, 2013).

Khusus bagi anak nelayan yang waktunya lebih banyak tersita untuk melaut, KKP mengadakan suatu program berupa program sekolah lapangan. Waktu belajar disesuaikan dengan jadwal anak, sedangkan kurikulum disesuaikan dengan materi yang mudah dipahami anak. Model sekolah semacam ini bertujuan untuk menjaring agar anak putus sekolah SD mendapatkan ijazah setara SLTP. Pelaksanaan ini telah dimulai pada tahun 2012 dengan pendirian sekolah lapangan di empat lokasi, yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng; Cilacap, Jateng; Belawan, Sumut; dan Kupang, NTT.

Pada tahun 2013 sekolah lapangan diperluas menjadi 10 lokasi meliputi Kep. Riau, Sibolga, Tegal, Pontianak, Bitung, Sulut, Ambon, Sorong, Lombok Timur, dan NTB (Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013). Penunjukkan lokasi untuk sekolah lapangan di atas berdasar pertimbangan, bahwa di tempat tersebut merupakan daerah mayoritas nelayan tradisional bermukim.

Pada dasarnya setiap etnis masyarakat mempunyai tradisi tertentu yang tidak sama antar daerah, demikian juga nelayan tradisional yang bertempat tinggal di pesisir pantai utara, khususnya desa Tunggulsari, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang seluruhnya berasal dari etnis Jawa. Menurut Kusnadi, etnis seperti ini merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh kebudayaan Jawa yang secara umum bersifat *egaliter* (Tateki YT, 2010:29). Dalam kebudayaan Jawa aspek dominan yang terlihat seperti sikap toleransi, *tepa selira*, dan santun masih mewarnai kebudayaan pada nelayan setempat. Hal ini dapat diungkap berdasarkan pendataan bahwa hubungan kekeluargaan di antara masyarakat setempat cukup erat.

Penduduk desa Tunggulsari merupakan komunitas nelayan yang bersifat turun temurun mewarisi orang tua bahkan nenek moyang, sehingga jarang yang bekerja di luar kenelayanan. Nelayan tersebut termasuk nelayan tradisional, hanya memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, seperti perahu kecil yang hanya memuat dua-tiga orang, jarak jelajah terbatas, alat tangkap sederhana, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana. Bekerja sebagai nelayan merupakan pilihan hidup, walaupun penghasilan yang diterima relatif terbatas. Hal ini berkait dengan rendahnya produksi yang disebabkan oleh permasalahan teknis, seperti keterbatasan jangkauan penangkapan, alat tangkap yang masih sederhana bahkan terlihat adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil tangkapan antara pemilik modal dengan nelayan (patron–klien).

Potensi dan sumber daya alam berupa hasil laut khususnya perikanan setempat cukup besar, sekitar 17.000 orang (2,9 persen) dari sejumlah penduduk Rembang yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Namun

kondisi ini seakan bertolak belakang, di satu sisi ada potensi dan sumber daya alam yang cukup melimpah, di sisi lain sumber daya manusia kurang mendukung sehingga hasil yang diperoleh tidak bisa maksimal. Kehidupan nelayan menjadi kurang, bahkan tidak sejahtera, sementara indikator kesejahteraan harus terpenuhi kebutuhan jasmani, rokhani dan sosial.

Seluruh penduduk desa Tunggulsari merupakan etnis Jawa, mempunyai hubungan persaudaraan sangat erat antar penduduk, sifat gotong royong, dan kesetiakawanan melekat dalam kehidupan masyarakat. Desa Tunggulsari mempunyai wilayah seluas 62.250 hektar dihuni penduduk cukup banyak. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah penduduk, laki-laki 444 jiwa dan perempuan 424 jiwa, mayoritas 398 jiwa (78,35 persen) sebagai nelayan yang merupakan pekerjaan pokok. Namun demikian ada penduduk yang bekerja di luar nelayan, seperti bengkel dan montir, berjumlah dua orang, 0,40 persen (Monografi Desa, 2010). Dari populasi penduduk tersebut, 30 orang di antaranya dipilih sebagai responden. Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Responden

N0	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persen
1	SD/ sederajat	15	50
2	SLTP/ sederajat	12	40
3	SLTA/ sederajat	3	10
Jumlah		30	100

Sumber: Jawaban Responden 2013 (N=30)

Hasil rekapitulasi di atas memperlihatkan, bahwa nelayan tradisional di Desa Tunggulsari mempunyai ciri yang sama, yaitu terbatas pendidikannya. Tingkat pendidikan 30 responden relatif rendah karena sebatas tamat tingkat SD dan SLTP, berjumlah 27 orang (90 persen) dan hanya tiga orang (10 persen) mampu menamatkan SLTA. Pendidikan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sehingga tidak mampu membiayai atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Mereka lebih mengutamakan melaut, karena secara ekonomi lebih menguntungkan daripada bersekolah, melaut

merupakan pekerjaan turun temurun yang diwariskan dari pendahulunya. Dengan pendidikan rendah, mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain menjadi nelayan, karena pendidikan rendah membatasi seseorang untuk terserap dalam akses sumber ekonomi lain yang lebih baik, sehingga seseorang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kemiskinan dan ketertinggalan, tidak terkecuali nelayan. Kualitas SDM nelayan yang rendah tidak terlepas dari biaya pendidikan yang tinggi, faktor penghambat nelayan tradisional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Akibat lebih lanjut mereka tidak mampu memberikan pendidikan formal yang cukup bagi anak, mereka terpaksa harus mempekerjakan anak seperti menjadi buruh nelayan, membantu melaut, mencari ikan tercecer yang bisa dijual, atau menjadi buruh di tempat pelelangan ikan (TPI).

Responden yang berpendidikan di atas SLTA tidak ada, berdasarkan runutan wawancara terungkap, bahwa apabila mereka melanjutkan pendidikan setelah SLTP harus keluar dari desa dan menempuh perjalanan cukup jauh, karena di sekitar tempat tinggal tidak ada sekolah SLTA. Untuk melanjutkan pendidikan diperlukan semangat tinggi untuk maju. Hal tersebut yang tidak dimiliki oleh setiap orang di Desa Tunjungsari, karena pada umumnya mereka berpendapat tidak perlu bersekolah tinggi karena pada akhirnya tetap menjadi nelayan. Mereka tidak pernah berpikir, bahwa menjadi nelayan yang terampil mengelola potensi dan sumber laut secara maksimal didasari oleh pendidikan dan pengetahuan yang cukup memadai untuk meningkatkan produktivitas. Secara logika produktivitas yang rendah akan menyebabkan rendahnya pendapatan. Hal ini menjadi faktor pendorong dengan mengharap agar anak-anaknya pada masa mendatang harus memperoleh pendidikan lebih memadai, minimal pada tingkatan sekolah menengah bahkan pendidikan tinggi. Asumsinya, dengan pendidikan yang memadai, kesempatan memperoleh pekerjaan akan lebih baik dan lebih terbuka.

Berkait dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu bentuk program kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan dapat mengelola sumber

daya alam setempat melalui pendidikan baik formal maupun non formal, seperti yang dilaksanakan di desa Tunggulsari. Adapun kegiatan yang pernah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan melibatkan pihak pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan institusi sosial dan Dinas Kelautan setempat. Adapun materi pelatihan berupa pemberian bimbingan keterampilan dalam rangka untuk meningkatkan produksi hasil perikanan dan kelautan serta pengolahannya agar dapat meningkatkan nilai jual. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Kelautan sebagai pemberi materi bidang ketrampilan, pengolahan dan pemasaran, sedangkan untuk bantuan peralatan dan pemberian motivasi diperoleh dari institusi sosial setempat melalui program Usaha Ekonomis Produktif (UEP). Selanjutnya, dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan dilaksanakannya pendampingan untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) agar tidak *gagap teknologi*. Hal ini bermitra dengan Dinas Pendidikan setempat. Sehingga kedepannya dapat melanjutkan pendidikan formalnya kejenjang yang lebih tinggi atau bisa melalui program *Kejar Paket*. Dalam serangkaian pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa ini dilaksanakan pada waktu setelah selesai aktivitas melaut sehingga tidak mengganggu pekerjaannya. Adapun pesertanya, yaitu penduduk yang masih berusia muda, mempunyai motivasi melanjutkan pendidikannya minimal sampai sekolah menengah atas (SLTA). Program yang telah berjalan ini, perlu mendapat apresiasi karena mempunyai motivasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya terutama dibidang perikanan dan kelautan. Kegiatan yang telah berjalan ini dipandang kurang maksimal disebabkan kurang adanya pendampingan dan bimbingan lanjut dari pihak berkompeten disebabkan berbagai kendala, diantaranya perencanaan program yang tidak berkelanjutan dan sinergis. Hal ini merupakan suatu bentuk kelemahan yang seyogyanya diperbaiki agar dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan secara tuntas.

Melengkapi kegiatan yang telah dilakukan tersebut, diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia khususnya dibidang

pendidikan formal. Hal ini seyogyanya dapat mengacu pada sistem sekolah lapangan yang telah dilaksanakan di daerah lain yang mempunyai potensi sumber laut cukup besar. Adapun pesertanya anak usia sekolah, dari usia tingkat SD, SLTP, dan SLTA hingga usia perguruan tinggi. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan program ini cukup fleksibel karena disesuaikan agar tidak bersamaan dengan waktu kegiatan melaut, sehingga tidak mengganggu aktivitas melaut. Pada umumnya nelayan Tunggulsari melaut dilakukan pada pagi hingga siang hari antara jam 05.00 s.d. 13.00 WIB, sehingga pelaksanaan belajar dapat dilakukan setelah aktivitas melaut. Materi pelajaran sesuai dengan kurikulum pada pendidikan formal yang menunjang pada kegiatan kenelayanan, seperti pengolahan sumber daya setempat diwujudkan dalam keterampilan pembuatan garam, tambak bandeng, udang, dan pengelolaan usaha, serta manajemen pemasaran hasil. Melalui sekolah ini diharapkan anak menjadi tidak putus sekolah, mempunyai bekal pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) dalam mengelola sumber daya alam. Dengan pernyataan lain pendidikan pada anak nelayan ini mampu meningkatkan kualitas SDM pada nelayan tradisional dimasa mendatang. Kegiatan ini merupakan upaya mengatasi lingkaran kemiskinan yang telah berlangsung lama dan cenderung sulit diputus.

Dalam pelaksanaan program tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan instansi pemerintah terkait, seperti yang telah dilaksanakan oleh Instansi Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Instansi Pendidikan diatas dengan membuka program studi ilmu perikanan dan kelautan. Gagasan ini dapat diterapkan di lokasi penelitian yang mempunyai permasalahan relatif sama. Realisasi program ini hendaknya memiliki relevansi dengan pendidikan dan *setting* pembelajaran yang disesuaikan dengan kehidupan nelayan dan ditujukan untuk mengembangkan keterampilan, dan keilmuan serta wawasan sehingga mereka mempunyai kemampuan mengelola sumber daya alam pesisir berupa keterampilan menggunakan teknologi tepat guna tanpa menghilangkan nilai positif yang berlaku dimasyarakat. Nantinya diharap-

kan menjadi generasi nelayan yang terhindar dari stigma marginalisasi nelayan miskin.

F. Penutup

Kemiskinan nelayan tradisional di Desa Tunggulsari, Kabupaten Rembang disebabkan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan relatif rendah, sehingga mereka kurang mampu mengelola sumber daya alam berupa hasil kelautan dan perikanan. Pada dasarnya sumber tersebut merupakan potensi yang apabila dikelola dan dikembangkan secara maksimal dapat memberikan penghidupan layak bagi keluarga nelayan tradisional.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada nelayan tradisional, pemerintah perlu menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan sekolah (disebut sekolah lapangan), baik bagi nelayan berusia muda maupun pada anak nelayan. Diharapkan anak-anak nelayan yang sudah menginjak remaja telah selesai menempuh pendidikan dasar agar dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan. Melalui pendidikan sekolah (lapangan), anak nelayan tradisional diharapkan memiliki pengetahuan, dan wawasan tentang teknologi tepat guna dalam mengelola potensi dan sumber kelautan serta perikanan secara maksimal. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya pelatihan keterampilan kenelayanan yang berkait dengan teknologi penangkapan ikan, pengelolaan pasca panen, dan jejaring serta manajemen usaha sehingga mereka mampu mengembangkan usaha secara maksimal. Pemberdayaan nelayan melalui pendidikan berbasis komunitas nelayan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, termasuk kalangan akademisi dan praktisi pendidikan untuk menjalin mitra, dan agar berperan secara aktif memecahkan berbagai persoalan kompleks yang dihadapi nelayan tradisional dengan tetap bertumpu pada pranata sosial budaya masyarakat nelayan.

Pustaka Acuan

Ahmad Avenroza dkk, (2007), *Analisis dan Perhitungan Tingkat kemiskinan Tahun 2007*, Jakarta:

- Aria Satria, *Negeri Bahari yang Melupakan Nelayan*, Senin, 9 Juni 2008, PRI/Kompas Images
- Kusnadi, (2008), *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta:LKiS
- Lexy Maleong,(2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya
- Muhammad Idrus,(2007), *Metode-Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : UII Press
- Muhammad Badiran,(2009), *Kajian Model Pendidikan Dasar Untuk Anak Masyarakat Nelayan Di Sumatra Utara*, Kementerian Pendidikan Nasional
- Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2013), Jakarta
- Radi R dan Riant Nugroho,(2007), *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Elex Medio Komputindo
- Suseno,(2007), *Menuju Perikanan Berkelanjutan*, Jakarta:Pustaka Cidesindo
- Sutomo, (2008), *Strategi-Strategi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tukiran,dkk, (2007), *Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tateki Yoga T, dkk, (2010), *Persepsi Nelayan Tradisional dan keluarganya Tentang Upaya Penganekaragaman Mata Pencaharian untuk Meningkatkan kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Citra Media
- _____. (2013). www.bunghatta.ac.id: nelayan cerdas-nelayan mandiri, 13 Juli 2013
- _____. (2010) Profil Desa Tunggulsari, Kec. Kaliori, Kab.Rembang, 2010
- _____. (200) Undang-undang NO 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kemensos.
- _____. (2014) Makalah: Sejarah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bandung: FKIP Unpad.
- _____. (2008). Biro Pusat Statistik,(2008), *Nelayan dalam Angka*. BPS: Jakarta.